

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena perubahan pola ekonomi yang bersifat mendasar atau struktural menjadi ekonomi yang mengacu ke arah pasar bebas. Hal ini ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, melainkan semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara (Zaroni, 2015). Menurut Friedman (2002), terdapat tiga dimensi dalam globalisasi ekonomi. Pertama, dimensi ide atau ideologi yaitu “kapitalisme”. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yakni falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak terhalang sedikitpun. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas. Dengan demikian, fenomena globalisasi ekonomitentunya telah memberikan efek yang cukup meluas pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya di suatu negara.

Di Indonesia, globalisasi ekonomitelah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor perdagangan dan perindustriannya. Salah satu bukti konkret dari hal tersebut yaitu industri kerajinan kain sarung tenun di Kota Tegal. Globalisasi ekonomi telah menjadi sebuah jembatan bagi beberapa industri kerajinan kain sarung tenun di Kota Tegal untuk menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Hubungan dagang yang

terjalin diantara kedua pihak ini, berimbas kepada peningkatan penjualan ekspor kerajinan kain sarung di Kota Tegal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tegal, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, volume penjualan ekspor tekstil termasuk kerajinan kain sarung tenun, kerap mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, rata-rata indeks ekspor kain sarung sebesar 7,03% per tahun. Kemudian, pada tahun 2011, rata-rata indeks ekspor tahunan kerajinan kain sarung mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,71%. Tahun 2012, indeks rata-rata ekspor kain sarung meningkat menjadi 8,28%. Demikian pula pada tahun 2013, indeks rata-rata ekspor kain sarung meningkat menjadi 8,56%. Pada tahun 2014, indeks rata-rata ekspor kerajinan kain sarung sedikit mengalami penurunan menjadi 7,67% per tahun.

Sedangkan menurut data dari PT Asaputex Jaya yang merupakan salah satu industri kerajinan kain sarung yang terdapat di Kota Tegal, hasil keuntungan yang didapatkan dari penjualan ekspor kain sarung tenun ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika dari tahun 2012 sampai dengan 2014 menyentuh jumlah yang sangat fantastis. Pada tahun 2012, omsetpenjualan ekspor oleh PT Asaputex Jaya berjumlah sebesar Rp 28.851.187.593,-. Pada tahun 2013, omset meningkat menjadi sebesar Rp 28.969.507.620,-. Pada tahun 2014, omsetperusahaan sedikit menurun menjadi sebesar Rp 28.180.322.550,-.

Disamping itu, kesuksesan industri kerajinan kain sarung tenun Kota Tegalmemiliki potensi yang besar, serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian Kota Tegal, misalnya dalam hal menambah mitra dagang luar negeri di Kota Tegal, memperluas lapangan pekerjaan, menambah kesempatan berusaha, serta peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Tegal.

Namun pada tahun 2015, telah terjadi konflik besar di Yaman yang juga berimbas pada perekonomian di Indonesia termasuk Kota Tegal. Konflik di Yaman tahun 2015 merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah Yaman dengan kelompok SyiahHouthi. Konflik ini bermula pada tahun 2003, dimana pemerintah Yaman terus berjuang untuk melawan pemberontak SyiahHouthi yang berpusat di Provinsi Sa'ada, Yaman Utara. Di tahun 2015, konflik ini kembali memanas dikarenakan kelompok SyiahHouthi berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi Yaman dan menguasai ibu Kota Yaman. Mendengar kejadian tersebut, Arab Saudi beserta koalisi sepuluh negara teluk tidak tinggal diam. Arab Saudi bersama Uni Emirates Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania, Mesir, Sudan, Maroko dan Pakistan bersatu padu untuk melumpuhkan pemberontak Houthi yang menduduki sebagian besar wilayah strategis Yaman, termasuk ibukota negara, Sana'a. Pasukan koalisi sepuluh negara teluk yang dipimpin Arab Saudi menggempur pemberontak Houthi di Yaman dengan kekuatan besar. Tak kurang 100 pesawat tempur dan 150 ribu personel angkatan darat Saudi Arabia dikerahkan, dibantu pesawat-pesawat sembilan negara teluk lainnya. Konflik ini tentu memicu situasi yang sulit sekaligus berdampak buruk bagi ekonomi di Indonesia khususnya industri kerajinan kain sarung di Kota Tegal.

Imbas terjadinya konflik di Yaman terhadap industri kerajinan kain sarung di Kota Tegal yakni penurunan tajam indeks ekspor kerajinan kain sarung di Kota Tegal ke negara tujuan utama, seperti Timur Tengah dan Afrika. Berdasarkan informasi dari narasumber, konflik yang terjadi di Yaman pada tahun 2015 telah menyebabkan pengrajin Sarung Goyor khas Tegal berhenti mengeksport produksi mereka ke

Yaman. Tidak hanya Yaman, pengiriman sarung ke beberapa negara di Timur Tengah pun ikut anjlok¹. Selain itu, menurut data yang diperoleh dari PT Asaputex Jaya menyebutkan bahwa laba perusahaan pasca adanya konflik di Yaman pada tahun 2015 menurun drastis menjadi sebesar Rp 20.595.969.980,- disusul pada tahun 2016, total keuntungan hasil ekspor dari perusahaan hanya sebesar Rp 9.735.408.350,-.

Penurunan tajam indeks ekspor produksi kain sarung tenun ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan kerajinan kain sarung tenun di Kota Tegal gulung tikar yang akhirnya berimbas terhadap peningkatan angka pengangguran serta turunnya taraf hidup masyarakat Kota Tegal.

Melihat situasi tersebut, maka perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai peran dari PT Asaputex Jaya dan pemerintah Kota Tegal untuk berusaha menangani dan mencari solusi dari permasalahan internasional tersebut agar tidak memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan dan peningkatan ekspor kerajinan kain sarung tenunserta meningkatkan dan mengembangkan kembali ekspor kain sarung tenun.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan hal-hal yang merupakan masalah dari penelitian ini, yaitu:

¹Mujiono, B. (2015, April 06). *Yaman Berkonflik, Produsen Sarung Tegal Terkena Imbas*. Diambil kembali dari metrotvnews.com: <http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/06/381891/yaman-berkonflik-produsen-sarung-tegal-terkena-imbis>

“Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam mendorong ekspor kain sarung tenun tahun 2015-2017?”

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan ekspor kerajinan kain sarung tenun di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui dampak konflik Yaman terhadap indeks ekspor penjualan kain sarung tenun di Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh PT Asaputex Jaya dan pemerintah Kota Tegal untuk meningkatkan ekspor kerajinan kain sarung tenun pada tahun 2015-2017.
4. Sebagai wujud pengaplikasian teori-teori yang penulis dapatkan selama masih duduk di bangku kuliah.
5. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Landasan Teori

Untuk menjelaskan rumusan masalah di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Keynes

Teori ekonomi Keynes merupakan teori yang digagas oleh pakar ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Teori ini merupakan bentuk kritikan dari paham ekonomi klasik yang berorientasi *market related*. Pembentukan teori Keynes bermula pada awal abad ke-20 an, paham perekonomian masih sangat kental dengan faham “laissez faire- laissez passer”, seperti yang diinginkan oleh kaum klasik dan neo klasik. Didasarkan pada pendapat J.B Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri (supply creates it's own demand), oleh karena itu banyak perusahaan berlomba-lomba untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya². Hal ini tentunya berakibat kepada banyak produksi yang tak terkendali. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 30-an yang berujung kepada depresi besar-besaran dalam dunia perekonomian, yakni perekonomian ambruk, pengangguran merajalela, dan inflasi tinggi tak terkendali. Krisis yang dialami Negara Negara maju ini, bahkan sampai beberapa pihak menyatakan bahwa ramalan mark tentang kejatuhan kapitalis menjadi nyata.

Dalam situasi krisis yang maha dahsyat tersebut pakar- pakar ekonomi klasik dan neo-klasik sama sekali tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, apalagi memberikan jalan keluar. Persoalan yang terjadi terbilang sangat baru

² <https://visionergroup.wordpress.com/2016/03/24/teori-ekonomi-keynes-neo-keynes-dan-new-keynes/> diakses pada 5 Mei 2017

yang tak dijumpai di saat-saat sebelumnya. Dan di saat suasana yang berkecamuk inilah lahir seorang pakar ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu J.M Keynes. Atas depresi besar-besaran yang terjadi kala itu tentu merangsang timbulnya pertanyaan, bahwa ada yang salah mungkin dalam teori ekonomi yang dikembangkan oleh mazhab klasik dan neo-klasik. Keynes pun menyerap seperti apa teori klasik dan neo-klasik. Lalu mencari kenapa sistem ekonomi yang didasarkan pada teori klasik dan neo-klasik bisa luluh lantah.

John Meynard Keynes (1883-1946), merupakan seorang dosen di Cambridge University. Gelar dosen dia dapat di usia kurang dari 30 tahun. Orangtua dari John Neville Keynes, juga merupakan seorang ahli ekonomi yang cukup disegani. Pengaruh Keynes sangat besar dalam perjanjian Bretton woods tahun 1946 dan dalam pembentukan badan moneter internasional IMF (International Monetary Fund). Atas jasa jasanya yang besar dia diangkat menjadi “baron”, gelar kebangsawanan yang sangat tinggi di Eropa.

J.M Keynes banyak mengkritik teori yang dikembangkan oleh mazhab klasik dan neo-klasik. Salah satunya Keynes beranggapan bahwa teori mazhab klasik dan neo-klasik hanya relevan diterapkan dalam sistem ekonomi mikro yang sederhana dan tak relevan apabila diterapkan dalam sistem ekonomi makro. Meskipun sebenarnya Keynes percaya akan “faham laissez faire-laissez passer”, akan tetapi menurutnya teori

tersebut akan sangat lama dalam memecahkan permasalahan ekonomi dan menurutnya satu satunya jalan untuk menuju titik seimbang adalah intervensi pemerintah³.

1. Underemployment Ekuilibrium

Mazhab klasik dengan faham *laissez faire- laissez passer* nya berpandangan bahwa dengan fahamnya itu perekonomian akan selalu menuju pada keseimbangan (ekuilibrium). Keseimbangan yang dimaksud adalah kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh dari balas jasa atas factor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dll. Dan factor produksi itu akan digunakan sepenuhnya untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan⁴.

Posisi ekuilibrium ini dianggap sebagai keadaan yang normal. Jika terjadi perubahan keadaan, misal terjadi perubahan keadaan, misal kelebihan produksi, kekurangan konsumsi, pengangguran, maka itu dianggap pergeseran yang temporer (sementara). Dan nanti akan ada *invisible hand* (tangan tak kentara) yang akan menstabilkannya. Mereka juga percaya bahwa adanya keseimbangan semua sumber daya,

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full employment), dan tak ada pengangguran.

Akan tetapi pemikiran klasik tak sesuai dengan kenyataan yang dialami dalam depresi besar besaran di dasawarsa 30. Maka dari itu Keynes memeriksa kembali sistem ekonomi klasik dan neo-klasik beserta asumsi dasarnya.

Akhirnya Keynes berasumsi bahwa dalam dunia modern belum tentu posisi ekuilibrium adalah posisi yang lazim. Dan keadaanya seperti pengandaian pengandaianya tadi. Dengan kata lain bahwa ketika proses kegiatan ekonomi dibiarkan begitu terus, underemployment ekuilibrium lah yang menjadi keadaan lazim. Bahkan dalam hal ini, Keynes mengkritik habis habisan. Bahwa hal ini adalah sesuatu yang keliru. Keynes mengatakan bahwa biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Karna biasanya permintaan dibuat efektif, karna adanya masyarakat yang menabung, asuransi, dll. sehingga menjadi lebih kecil dari total produksi. Inilah yang terjadi dalam dasawarsa 30. Produksi menumpuk, disisi lain daya beli terbatas. Sebagian perusahaan terpaksa mengurangi produksi, bahkan ada yang melakukan rasionalisasi dengan mengurangi

produksi serta mengurangi pekerja-banyak pengangguran.

2. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Mengacu pada depresi besar-besaran pada dasawarsa 30, Keynes merekomendasikan agar sistem perekonomian tidak begitu saja diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam batas tertentu peran pemerintah sangat dibutuhkan. Misalnya, ketika banyak pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian pengangguran bisa bekerja lagi, dan otomatis menambah pendapatan masyarakat. Ketika harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah peredaran uang dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi bisa terkendali.

Berbagai kebijakan Keynes sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan menyuntikkan dana, berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijakan ini dinilainya sangat ampuh untuk meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama disaat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.

2. Model Hubungan Transnasional

Secara harfiah, kata transnasional dapat diartikan dengan “Lintas Bangsa”, yang

berarti interaksi ke luar dari wilayah dalam negeri. Menurut James Rosenau, transnasionalisme adalah proses di mana hubungan internasional yang dilangsungkan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan antar individu, kelompok dan pihak swasta. Sedangkan menurut Richard Falk, transnasional didefinisikan sebagai perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah.

Oleh karena itu, hubungan transnasional dapat diartikan sebagai hubungan antar masyarakat, organisasi, kelompok maupun komunitas dari negara yang berbeda. Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan internasional bisa saja terjadi diantara orang yang tidak mempresentasikan negaranya. Model hubungan transnasional berasal dari usulan para pengkritik state-centric, dengan asumsi pokok dari pandangan ini yaitu berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatkan peranan aktor non-negara. Ciri pokok dalam hubungan transnasional ialah adanya berbagai jenis interaksi yang mem-by-pass pemerintah negara-negara dan yang secara langsung mempengaruhi dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional. Dalam hal ini, aktor non-negara memiliki peran yang jauh lebih penting daripada yang digambarkan oleh model realis atau state-centric⁵. Aktor-aktor ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis,

⁵Mas'ood, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Jakarta: LP3S.

atau separatis didalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah. Dalam pelaksanaan hubungan transnasional ini sering kali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan negara yang terlibat, bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan kepada isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah.

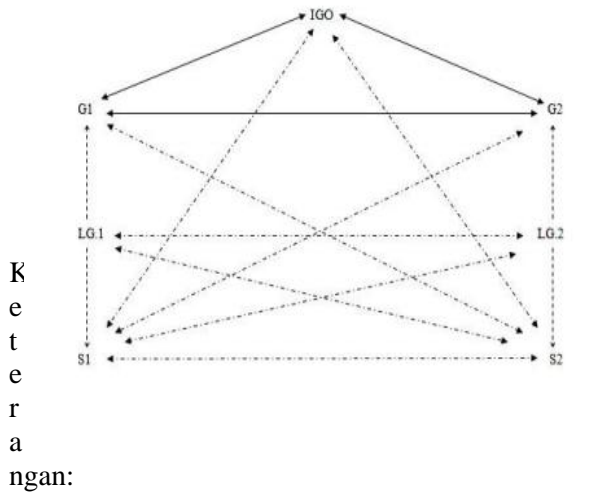
Menurut Keohane dan Nye meningkatnya hubungan antar masyarakat, organisasi dan kelompok yang menyebabkan terjadinya hubungan transnasional adalah semakin mudahnya komunikasi, transportasi, transaksi financial dan perjalanan lintas benua. Interaksi ini menimbulkan banyak efek, makin banyak terciptanya organisasi berbasis transnasional dapat berdampak pada kebijakan lokal. Semakin besarnya organisasi transnasional dapat menjadi oposisi dari kebijakan pemerintah lokal. Pola hubungan transnasional ini melibatkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai jenis aktor non negara, terutama dari organisasi internasional maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru.

Hubungan dagang yang terjalin antara Kota Tegal dengan Timur Tengah dan Benua Afrika merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari

birokrasi Pemerintah pusat seperti halnya pemerintah kota atau negara bagian. Disamping itu, masyarakat pun juga dapat berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat negara lain tanpa memerlukan pemerintah pusat. Bagan pola Interaksi hubungan transnasional dan politik antar negara dapat digambarkan dalam bagan gambar berikut ini:

Gambar 1

Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara



- = Hubungan Dalam Negeri
- = Hubungan Transnasionalisme
- · - · - · = Interaksi Sosial
- IGO = Organisasi Antar Pemerintah

- G = Pemerintah
- LG = Pemerintah Daerah
- S = Masyarakat

Gambar diatas menyimpulkan bahwasanya hubungan internasional tidak hanya melibatkan dalam lingkup negara saja (garis lurus) melainkan juga dari organisasi non-pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Bahkan masyarakat pun dapat juga berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain tanpa melalui perantara pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapatlah diketahui bahwa pola hubungan internasional memungkinkan banyak peran aktor non-negara, artinya masyarakat dari suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain. Dan organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara pemerintah pusat.

Berdasarkan dari keterangan di atas, kerjasama yang dilakukan oleh PT Asaputex Jaya Kota Tegal dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika dapat menjadi contoh yang tepat dalam hal menjelaskan kerjasama yang terjalin antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat negara lain. Pemerintah Kota Tegal juga ikut terlibat dalam mengatur kerjasama yang terjalin antara industri kerajinan kain sarung tenun dengan negara lain. Dari bagan tersebut dapat dilihat

bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) sebagai unsur Pemerintah Pusat (GI) setelah itu diteruskan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) dalam hal ini Disperindagkop Kota Tegal, dalam kedudukannya sebagai Lokal Government (LG), yaitu pemerintah Kota Tegal.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dan Kota Tegal menjadi implementator dari hubungan kerjasama dengan beberapa negara. Sebelum adanya otonomi daerah⁶, kerjasama yang ingin dilakukan oleh setiap daerah dengan pihak lain diluar negeri sering terkendala akibat daerah tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk bisa berhubungan/bekerjasama dengan negara asing, karena hubungan luar negeri masih menjadi wewenang oleh pihak pemerintah Pusat. Kemudian, pemerintah pusat menetapkan UU tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 yang berisi tentang otonomi daerah, serta dalam UU Nomor 32 tahun 2004, tentang kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri sebagaimana terdapat dalam pasal 42 ayat 1, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya UU yang memuat kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri/kerjasama

⁶ Hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

luar negeri, menyebabkan aktor hubungan internasional tidak hanya negara melainkan juga propinsi dan kabupaten atau kota. Disamping itu, dengan ditetapkannya peraturan tentang adanya otonomi daerah, maka pemerintah memiliki kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

E. Hipotesa

Berdasarkan landasan teori dan pokok permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal melalui Disperindagkop untuk meningkatkan ekspor kerajinan kain sarung pasca konflik di Yaman adalah:

1. Pemerintah Kota Tegal berupaya untuk mendorong perluasan pasar dengan mencari objek pasaran di luar daerah konflik.
2. Pemerintah Kota Tegal juga berupaya untuk mengajak para produsen kain sarung tenun untuk bisa melakukan diversifikasi produk dengan memunculkan produk-produk baru selain sarung tenun, seperti sorban, peci serta pakaian bermotif sarung, serta mengadakan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk menggenjot para produsen sarung di Kota Tegal agar bisa bersaing di pasar dunia.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlampau meluas, penulis memutuskan untuk memfokuskan penelitian di Kota Tegal, dimana Kota Tegal termasuk dalam salah satu kota yang memiliki kontribusi dalam bidang ekspor kerajinan. Selain itu, untuk memudahkan penelitian serta menghindari kesulitan dalam pencarian dan pengumpulan data, maka penulis memfokuskan penelitian dalam bidang ekspor kerajinan kainsarung tenun di Kota Tegal.

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil atau tidaknya kegiatan penelitian sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain, yaitu mempunyai objek, sudut pandang terhadap objek metode, serta hasil-hasil pandangnya merupakan suatu kesatuan utuh dan bulat atau sistematis.

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang diungkapkan oleh DR. Lexy J. Moleong, M.A., dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Meskipun demikian, penelitian secara kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Akan tetapi, tidak terlalu banyak

mendasarkan diri atas data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara untuk mengantar dan mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.

2. Penulisan Menggunakan Data Primer

Teknik pengumpulan data diambil melalui wawancara secara langsung antara penulis dengan direktur PT Asaputex Jaya dan pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).

3. Penulisan Menggunakan Data Sekunder

Pengumpulan data melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, website, dan bahan-bahan kajian lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang peran kerajinan kain sarung tenun terhadap perekonomian Kota Tegal.

BAB III membahas tentang konflik Yaman dan dampaknya terhadap kerajinan kain sarung tenun di Kota Tegal.

BAB IV membahas tentang upaya PT Asaputex Jaya dan pemerintah Kota Tegal melalui

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kota Tegal untuk meningkatkan ekspor kain sarung tenun pada tahun 2015-2017.

BAB V merupakan bab terakhir dan penutup skripsi ini yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.